

## IMPLEMENTASI WEB e-HDW (ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DESA TALAWE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Daryuni<sup>1</sup>, Andi Astinah Adnan<sup>2</sup>, Erfina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: daryuniibrahim@gmail.com

Email: andi.astinah.adnan@umsrappang.ac.id; erfinafisip.05@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the e-HDW (Electronic Human Development Worker) web application by Human Development Cadres (KPM) in data-based health development planning in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors of its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. The informants consisted of the Human Development Cadre (KPM), village government officials, and village midwife/health workers. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using Miles' (1994) interactive model assisted by NVivo software. The results show that the e-HDW application has been routinely used by KPM, village government, and health workers as a basis for health development planning. The implementation is analyzed through six dimensions of Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory, covering policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, socio-economic and political conditions, and the disposition of implementers. Supporting factors include village government commitment, KPM's motivation, good coordination, and cooperative community participation. The main inhibiting factor is unstable internet connectivity. The convergence score of Talawe Village increased significantly from 27.88% in Quarter 1 to 81.61% in Quarter 2 of 2026, with 1,034 out of 1,267 services completed, indicating that the e-HDW application is actively implemented and operational.

**Keywords:** Policy Implementation; e-HDW Application; Health Development Planning.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi web e-HDW (Electronic Human Development Worker) oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam perencanaan pembangunan kesehatan berbasis data di Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan terdiri atas KPM, aparat pemerintah desa, dan bidan/tenaga kesehatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles (1994) yang dibantu perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-HDW telah digunakan secara rutin oleh KPM, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan. Implementasi dianalisis melalui enam dimensi teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa, motivasi KPM, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat utama adalah ketidakstabilan jaringan internet. Skor konvergensi Desa Talawe meningkat signifikan dari 27,88% pada Triwulan 1 menjadi 81,61% pada Triwulan 2 Tahun 2026, dengan 1.034 dari 1.267 layanan terpenuhi, yang menjadi bukti empiris bahwa aplikasi e-HDW benar-benar terimplementasi dan dijalankan secara aktif.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Aplikasi e-HDW; Perencanaan Pembangunan Kesehatan.

*Penerbit:*

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

255

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel (Sarifudin & Hotman, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana penting dalam memperkuat proses administrasi publik di berbagai tingkatan pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, serta akuntabilitas melalui pengelolaan data dan informasi yang lebih akurat (Setyarto & Judijanto, 2025). Dalam era digital, pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan data pembangunan.

Dalam era digital, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan aplikasi web e-HDW (Electronic Human Development Worker) sebagai inovasi dalam sistem administrasi data pembangunan manusia di tingkat desa. Melalui aplikasi ini, Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjalankan fungsi pengelolaan data pembangunan manusia di tingkat desa sebagai bagian dari upaya perencanaan kesehatan berbasis digital. Aplikasi e-HDW berfungsi sebagai alat pengumpulan dan pelaporan data yang mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning), terutama dalam mendukung percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait implementasi e-HDW dan program pengelolaan data kesehatan di tingkat desa. Nurjanah dkk. (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwa proses inovasi penyampaian informasi melalui aplikasi e-HDW sudah efektif dengan nilai 85,45% berdasarkan lima dimensi difusi inovasi, dan berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,9% menjadi 8,4%. Sementara itu, penelitian Fitrauni dkk. (2022) di Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa pembentukan KPM dan penerapan sistem manajemen data berbasis digital merupakan komponen kunci dalam strategi percepatan penurunan stunting melalui 8 aksi konvergensi. Susanti dan Mardhiah (2022) yang meneliti Kabupaten Simeulue menegaskan bahwa penggunaan perangkat Android berbasis aplikasi e-HDW oleh KPM berkontribusi pada keberhasilan kabupaten tersebut mendapatkan penghargaan kinerja pencegahan stunting terbaik di Provinsi Aceh. Penelitian Aisyah dan Choiriyah (2025) menambahkan dimensi efektivitas, di mana keberhasilan e-HDW tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur teknologi, melainkan oleh sejauh mana sistem dioperasikan secara konsisten dan datanya digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan di tingkat kabupaten atau menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan responden yang luas. Belum banyak penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi proses implementasi e-HDW di tingkat mikro (desa) dengan model satu KPM per desa sebagai pengelola tunggal data digital, khususnya terkait bagaimana data yang dihasilkan diintegrasikan ke dalam mekanisme perencanaan formal seperti RKPDes. Jabon dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur teknologi, kapasitas digital KPM, serta koordinasi antarpemangku kepentingan di desa yang menyebabkan data belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pembaruan aplikasi e-HDW ke versi 2.0 pada akhir tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi versi sebelumnya telah berjalan efektif di tingkat desa.

Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu desa yang telah menggunakan e-HDW sejak tahun 2023 dengan model satu KPM per desa. Evaluasi implementasi di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesiapan administrasi desa dalam pengelolaan data digital, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dapat menjadi rujukan bagi optimalisasi program di desa-desa lain. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi e-HDW dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Desa Talawe dengan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi

aplikasi web e-HDW dalam perencanaan pembangunan kesehatan berbasis data di Desa Talawe? dan (2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi aplikasi web e-HDW oleh KPM di Desa Talawe?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada tahun 2025–2026. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi e-HDW, terdiri atas: (1) KPM sebagai informan kunci; (2) Kepala Desa/Sekretaris Desa; dan (3) Bidan Desa/Petugas Puskesmas. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi termasuk data dari dashboard aplikasi e-HDW Desa Talawe ([ehdw.kemendes.go.id](http://ehdw.kemendes.go.id)). Analisis data menggunakan model interaktif Miles (1994) yang terdiri dari empat tahap: reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan-verifikasi. Proses kategorisasi dibantu aplikasi NVivo melalui teknik Matrix Coding Query, Project Map, dan Word Frequency Query untuk memetakan distribusi temuan berdasarkan enam dimensi implementasi Van Meter dan Van Horn. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari KPM, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Implementasi e-HDW di Desa Talawe

Desa Talawe merupakan salah satu desa di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah mengimplementasikan aplikasi e-HDW sejak tahun 2023. Desa ini menerapkan model satu KPM per desa bernama Rusmiati sebagai pengelola tunggal data digital pembangunan manusia, sesuai kebijakan nasional Kemendes PDTT. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi e-HDW di Desa Talawe dapat dilihat dari data dashboard konvergensi yang tercatat pada sistem sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 1: Tampilan Dashboard Data Konvergensi Desa Talawe Tahun 2026 Triwulan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Gambar tersebut menunjukkan tampilan utama dashboard aplikasi e-HDW Desa Talawe yang diakses melalui akun KPM (Rusmiati) pada [ehdw.kemendes.go.id](http://ehdw.kemendes.go.id). Pada Triwulan 1 Tahun 2026, skor konvergensi desa tercatat sebesar 27,88% (329 dari 1.200 layanan). Angka ini mencerminkan kondisi awal tahun di mana pendataan belum sepenuhnya terlaksana, mengingat batas waktu validasi Triwulan 1 adalah

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

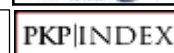
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

257

Indexed



SINTA 4



23 Maret 2026.

Perkembangan implementasi aplikasi e-HDW di Desa Talawe dapat dilihat dari peningkatan skor konvergensi yang signifikan, yaitu dari 27,88% pada Triwulan 1 menjadi 81,61% pada Triwulan 2 Tahun 2026 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

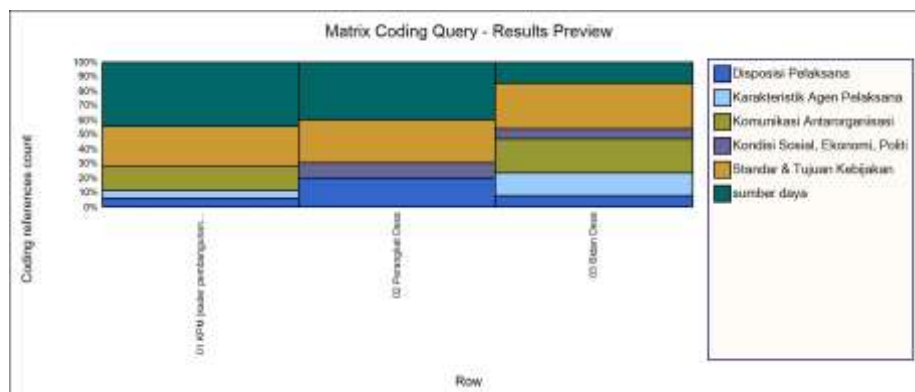
**Gambar 2 Total Skor Konvergensi Desa Talawe - Tahun 2026 Triwulan 2 (81,61%)**



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi aplikasi e-HDW di Desa Talawe telah terpenuhi dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pedoman operasional yang jelas serta pemahaman yang relatif seragam di antara para pelaksana mengenai tujuan penggunaan aplikasi sebagai alat pengelolaan data kesehatan berbasis digital. Peningkatan skor konvergensi dari 27,88% menjadi 81,61% dalam satu triwulan menjadi bukti nyata bahwa aplikasi e-HDW benar-benar terimplementasi dan dijalankan secara aktif oleh KPM di Desa Talawe. Kejelasan standar dan tujuan ini menjadi fondasi penting yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

Hasil Matrix Coding Query menunjukkan distribusi referensi pengkodean dari ketiga informan terhadap enam dimensi implementasi. Informan KPM memberikan referensi dominan pada dimensi Sumber Daya dan Standar & Tujuan Kebijakan, yang mencerminkan bahwa KPM sebagai pelaksana lapangan paling banyak menyinggung ketersediaan sarana dan pemahaman atas tujuan program. Informan Perangkat Desa lebih banyak memberikan referensi pada dimensi Disposisi Pelaksana dan Komunikasi Antarorganisasi, sedangkan Bidan Desa memberikan referensi merata pada dimensi Karakteristik Agen Pelaksana dan Standar & Tujuan Kebijakan.

**Gambar 3 Matrix Coding Query Hasil Analisis NVivo-Distribusi Referensi Pengkodean per Informan per Dimensi Implementasi**



Sumber: Olahan Peneliti menggunakan NVivo, 2026

Project Map yang dihasilkan dari NVivo memperlihatkan bahwa seluruh enam dimensi implementasi



## Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi standar dan tujuan kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan yang dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana. Dalam konteks implementasi e-HDW di Desa Talawe, standar operasional telah tersedia dalam bentuk pedoman teknis yang memuat alur kerja sistematis mulai dari login, pemetaan desa, pendataan sasaran 1.000 HPK, pemantauan indikator layanan, hingga pelaporan rutin. KPM sebagai pelaksana lapangan menyatakan: "Saya mulai menggunakan aplikasi e-HDW sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dalam pelaksanaan tugas, alurnya dimulai dari login, pemetaan desa, pendataan sasaran 1000 HPK, pemantauan indikator layanan setiap bulan, serta penyusunan laporan rutin."

Kejelasan tujuan kebijakan terbukti dipahami secara konsisten oleh ketiga aktor yang terlibat. KPM memahami bahwa e-HDW digunakan "untuk mengetahui tumbuh kembang bayi balita dan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat berbasis data", sementara pemerintah desa menegaskan bahwa "dari aplikasi itu kita dapat memantau kondisi kesehatan anak, seperti anak yang kurang gizi". Bidan desa menambahkan bahwa "aplikasi ini berfungsi untuk memetakan dan memantau sasaran 1.000 HPK sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan lebih cepat." Keselarasan persepsi ini secara teoritis sangat signifikan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa semakin jelas dan disepakati standar serta tujuan kebijakan, semakin besar kemungkinan implementasi berhasil. Keselarasan ini merupakan fondasi keberhasilan yang membedakan Desa Talawe dari banyak desa yang mengalami ambiguitas tujuan program. Bukti empiris keberhasilan dimensi ini terlihat dari peningkatan skor konvergensi yang signifikan dari 27,88% menjadi 81,61% dalam satu triwulan.

## Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai, mencakup sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Dalam implementasi e-HDW di Desa Talawe, sumber daya manusia berupa KPM yang terlatih dan konsisten menjalankan tugasnya merupakan aset utama program. KPM menjalankan pendataan secara mandiri dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber: data bayi dan balita dari posyandu yang dikelolanya sendiri, data ibu hamil dari bidan desa, serta data calon pengantin dari kantor desa.

Dari sisi sumber daya finansial, realisasi anggaran desa yang mendekati 100% mencerminkan komitmen fiskal pemerintah desa yang kuat terhadap program. Pemerintah desa juga menyediakan perangkat telepon genggam, laptop, dan honorarium bagi KPM beserta jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan argumen Heeks (2006) bahwa leadership commitment kepala desa yang diwujudkan melalui prioritas anggaran merupakan prasyarat utama transformasi digital. Namun demikian, dari sisi infrastruktur teknologi, masih terdapat kendala signifikan berupa jaringan internet yang tidak stabil. KPM menyatakan: "Kadang terkendala jaringan internet sehingga proses penginputan data menjadi lambat." Kondisi ini mengonfirmasi temuan Heeks (2003) mengenai infrastructure gap sebagai hambatan sistemik implementasi e-government di pedesaan, serta mendukung temuan Jabon dkk. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur sebagai kendala utama di berbagai desa yang mengimplementasikan e-HDW.

## Komunikasi Antarorganisasi

Dimensi komunikasi antarorganisasi dalam model Van Meter dan Van Horn (1975) mengacu pada sejauh mana koordinasi dan transmisi informasi berlangsung secara efektif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi. Di Desa Talawe, komunikasi antarorganisasi terjalin dalam tiga jalur utama: antara KPM dan bidan desa untuk verifikasi data kesehatan, antara KPM dan pemerintah desa untuk pelaporan dan perencanaan, serta antara pemerintah desa dan dinas kesehatan untuk koordinasi program secara makro.

KPM menyatakan: "Biasanya kami berkoordinasi dengan bidan desa untuk memastikan data ibu

hamil dan balita yang dimasukkan ke aplikasi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan." Pemerintah desa juga mengonfirmasi: "Kami selalu berkoordinasi dengan kader dan bidan desa terkait pendataan dan pemantauan sasaran program kesehatan di masyarakat." Pola komunikasi tripartit ini merupakan praktik terbaik yang sejalan dengan rekomendasi teoretis Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa komunikasi antarorganisasi yang efektif memastikan data terintegrasi, permasalahan cepat diselesaikan, dan intervensi kesehatan lebih terarah. Bukti empiris keberhasilan komunikasi ini terlihat dari tingginya skor konvergensi pada berbagai kelompok sasaran yang dicapai bersama antara KPM dan bidan desa di lapangan. Koordinasi yang terstruktur ini menghasilkan output yang terukur dan membuktikan bahwa e-HDW dioperasikan secara aktif, bukan sekadar tersedia secara teknis.

## Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa karakteristik agen pelaksana mencakup kemampuan, kompetensi, struktur, dan norma organisasi memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi. Dalam konteks Desa Talawe dengan model satu KPM per desa, seluruh beban operasional program bertumpu pada satu individu, sehingga karakteristik personal KPM menjadi faktor yang sangat determinatif. KPM Desa Talawe menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi, komitmen tinggi dalam menjalankan pendataan secara rutin dan mandiri, serta kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak secara proaktif. Karakteristik ini mencerminkan apa yang oleh Edwards III (1980) disebut sebagai disposisi positif kecenderungan pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Konsistensi KPM dalam mengumpulkan data dari posyandu, bidan desa, dan kantor desa secara mandiri merupakan bukti nyata karakteristik agen pelaksana yang kompeten dan berkomitmen. Temuan ini sejalan dengan Arini dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa KPM aktif dan terlatih dapat meningkatkan cakupan pemantauan tumbuh kembang anak dan mempercepat pelaporan kondisi kesehatan. Namun, model satu KPM per desa juga menciptakan kerentanan sistemik: seluruh keberlangsungan data digital bergantung pada satu individu, yang apabila berhalangan akan berdampak langsung pada kontinuitas implementasi.

## Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal sebagai salah satu dimensi implementasi yang kerap diabaikan namun sesungguhnya sangat memengaruhi keberhasilan program. Di Desa Talawe, kondisi sosial masyarakat yang kooperatif menjadi faktor lingkungan yang kondusif bagi implementasi e-HDW. KPM menyatakan: "Biasanya masyarakat bersedia memberikan informasi ketika kami melakukan pendataan, terutama terkait data ibu hamil dan balita." Keterbukaan masyarakat dalam memberikan data kepada KPM secara langsung mendukung kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan.

Dari dimensi politik lokal, dukungan kepala desa terhadap program e-HDW tercermin dari alokasi anggaran yang konsisten dan koordinasi aktif yang difasilitasi pemerintah desa. Stabilitas kepemimpinan desa yang suportif merupakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan implementasi, sebagaimana ditegaskan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa kondisi politik yang mendukung akan memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dari sisi ekonomi, keberagaman tingkat ekonomi masyarakat tidak menjadi hambatan berarti karena pendataan dilakukan langsung oleh KPM tanpa memerlukan biaya dari pihak warga. Kondisi ini berbeda dengan temuan di beberapa daerah lain di mana resistensi masyarakat terhadap program pendataan menjadi kendala tersendiri (Riana & Mursyidah, 2025).

## Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam kerangka Van Meter dan Van Horn (1975) berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana dengan disposisi positif akan menjalankan kebijakan secara optimal meskipun menghadapi hambatan teknis.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

261

Indexed



SINTA 4



Dalam implementasi e-HDW di Desa Talawe, KPM menunjukkan disposisi yang positif dengan tetap konsisten menjalankan pendataan meski menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil. KPM menyatakan: "Kami tetap berusaha melakukan pendataan dan memasukkan data ke aplikasi e-HDW karena data tersebut diperlukan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat."

Pernyataan ini mencerminkan apa yang oleh Van Meter dan Van Horn (1975) disebut sebagai komitmen intrinsik pelaksana motivasi yang bersumber dari dalam diri, bukan semata-mata dari insentif eksternal. Disposisi positif ini juga didukung oleh sikap adaptif KPM terhadap inovasi teknologi, termasuk kesediaan untuk mempelajari pembaruan aplikasi e-HDW. Dalam perspektif Grindle (1989), disposisi ini merupakan bagian dari kapasitas aktor implementasi yang menentukan keberhasilan program di lapangan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa disposisi positif semata tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Interaksi antara disposisi pelaksana yang kuat dengan hambatan infrastruktur yang persisten menciptakan kondisi di mana KPM harus bekerja lebih keras untuk mencapai output yang sama dibanding kondisi infrastruktur yang optimal.

## Pemanfaatan Data e-HDW dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pola pemanfaatan data e-HDW dalam mekanisme perencanaan formal desa. KPM mengungkapkan: "Data dari e-HDW tidak dibahas di Musrenbangdes, tapi digunakan langsung dalam penyusunan RKPDes. Data itu menjadi bahan bagi pemerintah desa untuk merencanakan program kesehatan." Temuan ini mengindikasikan bahwa data e-HDW telah menembus proses perencanaan formal yang merupakan capaian positif dari dimensi komunikasi antarorganisasi dan standar tujuan kebijakan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam forum deliberasi publik.

Dalam perspektif teori perencanaan berbasis data (Kusek & Rist, 2004), integrasi data e-HDW ke dalam RKPDes merupakan langkah maju menuju evidence-based planning di tingkat desa. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Tidak dibahasnya data e-HDW dalam Musrenbangdes berpotensi mengurangi akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas program kesehatan desa. Idealnya, data e-HDW yang menggambarkan kondisi riil kesehatan Masyarakat termasuk peta sebaran ibu hamil berisiko, balita stunting, dan keluarga rentan semestinya menjadi bahan diskusi publik dalam Musrenbangdes agar keputusan yang dihasilkan lebih representatif, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan analisis keenam dimensi implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), dapat diidentifikasi secara eksplisit faktor-faktor yang memengaruhi implementasi e-HDW di Desa Talawe. Faktor pendukung utama meliputi: pertama, komitmen dan dukungan pemerintah desa yang diwujudkan melalui alokasi anggaran, penyediaan perangkat, dan koordinasi aktif; kedua, motivasi intrinsik dan dedikasi KPM sebagai pelaksana tunggal yang tetap konsisten bekerja meski menghadapi keterbatasan; ketiga, koordinasi yang efektif antara KPM, pemerintah desa, dan bidan desa dalam memastikan akurasi dan kelengkapan data; dan keempat, partisipasi masyarakat yang kooperatif dalam memberikan informasi kepada KPM saat pendataan berlangsung.

Adapun faktor penghambat utama adalah ketidakstabilan jaringan internet yang secara langsung menghambat proses penginputan dan pengiriman data secara real-time. Hambatan ini bersifat struktural dan berada di luar kendali pelaksana di tingkat desa. Dalam kerangka Heeks (2003), kondisi ini mencerminkan infrastruktur gap yang merupakan salah satu komponen utama Design-Reality Gap dalam implementasi e-government di negara berkembang. Hambatan ini juga diidentifikasi oleh Hariyanto dkk. (2023) sebagai tantangan sistemik adopsi teknologi digital di masyarakat pedesaan. Keterbatasan ini perlu diatasi melalui intervensi kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi, mengingat perluasan jaringan

internet di pedesaan membutuhkan investasi infrastruktur yang melampaui kapasitas pemerintah desa.

Secara keseluruhan, perbandingan antara faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa implementasi e-HDW di Desa Talawe memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat, namun belum dapat dioptimalkan sepenuhnya karena terganjal hambatan infrastruktur teknis. Pola ini sesuai dengan temuan Aisyah dan Choiriyah (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas e-HDW diukur bukan dari kelengkapan fitur sistem, melainkan dari sejauh mana sistem benar-benar dioperasikan secara konsisten dan datanya digunakan dalam pengambilan keputusan. Desa Talawe telah memenuhi kriteria tersebut sebagian besar, dengan catatan bahwa aspek deliberasi publik melalui Musrenbangdes masih perlu diperkuat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, implementasi aplikasi e-HDW di Desa Talawe telah berjalan secara aktif dan terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan skor konvergensi yang signifikan dari 27,88% pada Triwulan 1 menjadi 81,61% pada Triwulan 2 Tahun 2026. Aplikasi e-HDW telah digunakan secara rutin oleh KPM untuk pendataan ibu hamil, bayi, dan balita, dengan data yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam RKPDes bidang kesehatan sebagai bentuk perencanaan berbasis bukti di tingkat desa.

Kedua, analisis berdasarkan enam dimensi Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi telah terpenuhi dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Dimensi standar dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi-politik menunjukkan capaian yang baik. Dimensi komunikasi antarorganisasi berjalan efektif melalui koordinasi tripartit antara KPM, pemerintah desa, dan bidan desa. Namun, dimensi sumber daya khususnya infrastruktur teknologi berupa jaringan internet masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat. Ketiga, data e-HDW telah berkontribusi pada perencanaan pembangunan kesehatan melalui mekanisme RKPDes, namun belum dimanfaatkan dalam forum Musrenbangdes sebagai arena deliberasi publik. Hal ini mengurangi potensi partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas program kesehatan desa yang seharusnya bersifat inklusif dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pemerintah kabupaten dan provinsi agar memprioritaskan perluasan infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan untuk mendukung operasional e-HDW; (2) pemerintah desa agar mengintegrasikan pembahasan data e-HDW ke dalam agenda Musrenbangdes sebagai bahan perencanaan berbasis bukti yang partisipatif; (3) Kemendes PDTT agar mempertimbangkan penguatan model KPM dari satu per desa menjadi tim kecil untuk mengurangi kerentanan sistemik; dan (4) penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan ke lebih banyak desa dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam untuk menghasilkan generalisasi yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Aisyah, N., & Choiriyah, I. U. (2025). The Effectiveness of Electronic Human Development Worker (E-HDW) in Managing Stunting Rates in Rangkah Kidul Village, Sidoarjo District. *Journal of Public Administration*, 2(2).
- Arini, D., Mayasari, A. C., & Rustam, M. Z. A. (2019). Gangguan Perkembangan Motorik dan Kognitif pada Anak Toddler yang Mengalami Stunting di Wilayah Pesisir Surabaya. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(2), 122–128.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman. (2022). Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.
- Grindle, M. S. (1989). *The New Political Economy: Positive Economics and Negative Politics*. World

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

263

Indexed



SINTA 4



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

Bank Publications.

- Hariyanto, Susanti, P. A., Hadjaat, M., Wasil, M., & Susilawati, A. D. (2023). Meningkatkan Literasi Teknologi di Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan Digital. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 12–21.
- Heeks, R. (2003). *Most e-Government-for-Development Projects Fail: How Can Risks Be Reduced?* IDPM i-Government Working Paper No. 14. University of Manchester.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. Sage Publications.
- Jabon, K., Firdaus, N. A., & Agustina, I. F. (2025). Implementation of the e-HDW Application in Supporting the Convergence of Stunting Management Programs in Desa Tambak. *Public Administration Journal*, 2(2), 2119–2140.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2023). *Pedoman Teknis Aplikasi e-HDW*. Kemendes PDTT.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. World Bank Publications.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, Nasution, B., Wahidar, T. I., & Putri, W. E. (2024). Efektivitas Komunikasi Inovasi Aplikasi E-HDW dalam Meningkatkan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 78–95.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Riana, A. D., & Mursyidah, L. (2025). Literature Study: The Effectiveness of the Use of e-HDW Applications in Increasing the Prevalence of Stunting. *Public Health Journal*, 2(2), 663–675.
- Sarifudin, R., & Hotman, F. (2024). Enhancing Transparency and Accountability in Public Administration Through Information Technology Utilization. *Journal of Public Administration Research*, 15(1), 32–40.
- Setyarto, D. B., & Judijanto, L. (2025). The Role of E-Government in Increasing Transparency and Accountability of Public Administration in the Digital Era. *International Journal of Digital Governance*, 9(2), 1771–1783.
- Susanti, M., & Mardhiah, N. (2022). Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 112–128.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

264

